



Penaklukan Mesir oleh Amr bin Ash: Strategi, Proses, dan Dampak Politik, Ekonomi, serta Sosial terhadap Perkembangan Islam di Mesir

Syahbuddin^{1)*}, Tati Haryati¹⁾

¹⁾STKIP Taman Siswa Bima

*Correspondence: oribedo70@gmail.com

ABSTRAK

Penaklukan Mesir oleh Amr bin Ash pada tahun 639–642 M merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah ekspansi Islam awal yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan peradaban Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Amr bin Ash, mengkaji proses penaklukan Mesir, serta mengevaluasi dampaknya terhadap perkembangan peradaban Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research dan pendekatan historis. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber sejarah yang relevan, meliputi sumber sejarah Islam klasik, karya historiografi modern, buku-buku sejarah, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang memungkinkan peneliti untuk melakukan interpretasi secara komprehensif terhadap fakta-fakta sejarah melalui analisis terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan metode kajian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penaklukan Mesir tidak semata-mata ditentukan oleh keunggulan militer, tetapi merupakan hasil dari interaksi antara strategi militer, kemampuan membaca situasi politik, dukungan kekhalifahan, dan kondisi internal Bizantium. Analisis terhadap berbagai sumber menunjukkan bahwa Amr bin Ash mampu menyesuaikan strategi dengan karakter geografis dan politik Mesir melalui mobilitas pasukan, penguasaan wilayah strategis, pengepungan benteng, serta penggunaan pendekatan diplomatik. Strategi tersebut memperoleh dukungan politik dari Khalifah Umar bin Khattab yang memberikan legitimasi dan sumber daya bagi kelanjutan ekspedisi. Pada saat yang sama, konflik dan melemahnya konsolidasi Bizantium menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi ekspansi Muslim. Proses penaklukan berlangsung melalui serangkaian operasi militer dan diplomasi, yang mencapai puncaknya dengan keberhasilan pengepungan Benteng Babilonia dan penaklukan Alexandria. Penaklukan Mesir memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan peradaban Islam, terutama dalam bidang politik, ekonomi, administrasi pemerintahan, penyebaran agama Islam, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Mesir kemudian berkembang menjadi salah satu pusat peradaban Islam terpenting yang berperan besar dalam pembentukan peradaban Islam klasik.

Kata Kunci: Penaklukan Mesir; Amr bin Ash; Benteng Babilonia; Kekaisaran Bizantium; Peradaban Islam

This is an open access article under the [CC-BY](#) license.



PENDAHULUAN

Penaklukan Mesir oleh pasukan Muslim di bawah komando Amr bin Ash pada pertengahan abad ke-7 Masehi merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah ekspansi Islam awal. Peristiwa ini bukan sekadar keberhasilan militer dalam memperluas wilayah kekuasaan Daulah Islam, tetapi juga menjadi titik balik yang menentukan dalam transformasi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan peradaban di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Sejumlah kajian terdahulu telah memberikan perhatian terhadap peristiwa tersebut, terutama dengan menempatkannya dalam konteks ekspansi kekhalifahan Islam, kemunduran atau melemahnya posisi Bizantium, serta tahapan militer yang berakhir dengan penguasaan Mesir dan Alexandria. Kajian mengenai Mesir pada masa awal Islam juga telah memperlihatkan pentingnya wilayah tersebut sebagai provinsi strategis dalam struktur kekhalifahan serta sebagai ruang pertemuan berbagai komunitas dan jaringan ekonomi. Namun demikian, pembahasan mengenai penaklukan Mesir masih sering disajikan secara terpisah antara aspek militer, kondisi politik Bizantium, dan perkembangan Mesir setelah penaklukan.

Dalam konteks sejarah dunia, Mesir merupakan salah satu wilayah yang memiliki posisi strategis sejak zaman kuno. Letaknya yang menghubungkan Afrika, Asia, dan kawasan Mediterania menjadikan Mesir sebagai pusat perdagangan, politik, dan kebudayaan selama ribuan tahun. Sejak era Firaun, masa kekuasaan Persia,

Yunani, Romawi, hingga Bizantium, Mesir selalu memainkan peran penting dalam dinamika peradaban dunia (Hitti, 1970). Oleh karena itu, keberhasilan pasukan Islam menaklukkan Mesir tidak hanya berarti perluasan wilayah administratif semata, tetapi juga menunjukkan perubahan keseimbangan geopolitik yang besar di kawasan Mediterania Timur.

Oleh karena itu, penguasaan Mesir oleh Amr bin Ash dapat dipahami sebagai peristiwa yang memiliki dua konsekuensi historis yang saling berhubungan. Pertama, secara teritorial, penaklukan ini memperluas wilayah kekuasaan Islam dari kawasan Syam menuju Afrika. Kedua, secara geopolitik, penaklukan ini menggeser pusat pengaruh politik dan ekonomi di Mediterania Timur dengan mengurangi kendali Bizantium atas salah satu provinsinya yang paling penting. Perubahan tersebut menjadi salah satu landasan bagi perkembangan peradaban Islam dalam bidang pemerintahan, perdagangan, kebudayaan, dan hubungan antarwilayah (Trombley, 2013).

Pada awal abad ke-7 Masehi, Kekaisaran Bizantium berada dalam kondisi yang relatif lemah akibat peperangan berkepanjangan dengan Kekaisaran Sasaniah Persia. Konflik yang berlangsung selama beberapa dekade tersebut telah menguras sumber daya ekonomi, melemahkan kekuatan militer, dan memicu ketidakpuasan masyarakat di berbagai provinsi, termasuk Mesir (Kaegi, 1992). Selain itu, kebijakan keagamaan Bizantium yang sering menekan kelompok Kristen Koptik menyebabkan munculnya ketegangan internal yang semakin memperburuk stabilitas politik wilayah tersebut. Kondisi inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor penting yang mempermudah keberhasilan ekspansi pasukan Muslim.

Penaklukan Mesir tidak dapat dilepaskan dari dinamika ekspansi Islam pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab (634–644 M). Setelah keberhasilan penaklukan wilayah Syam dan Palestina, perhatian pemerintahan Islam mulai diarahkan kepada Mesir yang dipandang sebagai wilayah strategis sekaligus sumber kekuatan ekonomi bagi Bizantium (Lapidus, 2014). Amr bin Ash, seorang sahabat Nabi yang dikenal memiliki kemampuan diplomasi, kecerdasan politik, dan strategi militer yang luar biasa, menjadi tokoh utama dalam ekspedisi tersebut. Keputusan Umar untuk mengizinkan ekspedisi ke Mesir, meskipun awalnya dilakukan dengan penuh kehati-hatian, menunjukkan adanya pertimbangan strategis yang matang dalam kebijakan ekspansi Islam (Donner, 1981).

Amr bin Ash merupakan salah satu figur penting dalam sejarah Islam awal. Sebelum memeluk Islam, ia dikenal sebagai diplomat Quraisy yang memiliki pengalaman luas dalam hubungan internasional dan perdagangan. Setelah masuk Islam, kemampuannya dalam bidang strategi, diplomasi, dan administrasi semakin menonjol, sehingga ia dipercaya memimpin berbagai ekspedisi penting (al-Umari, 1991). Penaklukan Mesir menjadi puncak prestasi militernya sekaligus menjadi fondasi bagi terbentuknya pemerintahan Islam di Afrika Utara.

Proses penaklukan Mesir berlangsung antara tahun 639–642 M dan melibatkan serangkaian operasi militer yang kompleks. Pasukan Muslim yang berjumlah relatif kecil harus menghadapi kekuatan Bizantium yang secara teoritis jauh lebih besar dan memiliki pengalaman perang yang panjang. Namun demikian, melalui kombinasi strategi militer yang efektif, mobilitas pasukan yang tinggi, pemanfaatan kondisi sosial-politik lokal, serta kepemimpinan yang adaptif, Amr bin Ash berhasil memperoleh kemenangan demi kemenangan hingga akhirnya menguasai seluruh wilayah Mesir (Kennedy, 2007).

Salah satu aspek yang menarik dalam penaklukan Mesir adalah strategi militer yang digunakan oleh Amr bin Ash. Berbeda dengan strategi perang konvensional yang mengandalkan superioritas jumlah pasukan, Amr lebih menekankan pada kecepatan gerak, penguasaan jalur komunikasi, pembangunan aliansi lokal, dan pemanfaatan kondisi psikologis lawan (Donner, 1981). Strategi ini menunjukkan bahwa keberhasilan ekspansi Islam awal tidak hanya disebabkan oleh semangat religius, tetapi juga oleh kemampuan organisasi, perencanaan strategis, dan kecerdasan politik para pemimpinnya.

Selain faktor militer, keberhasilan penaklukan Mesir juga dipengaruhi oleh kondisi internal masyarakat Mesir sendiri. Mayoritas penduduk Mesir saat itu adalah kaum Koptik yang selama berabad-abad mengalami diskriminasi politik dan keagamaan dari pemerintahan Bizantium (Butler, 1902). Kebijakan perpajakan yang berat, tekanan teologis, serta konflik internal antara otoritas Bizantium dan gereja lokal menyebabkan sebagian masyarakat Mesir tidak memberikan perlawanan yang signifikan terhadap kedatangan pasukan Muslim. Dalam beberapa kasus, masyarakat lokal bahkan menunjukkan sikap kooperatif terhadap pemerintahan Islam yang

baru.

Kajian mengenai penaklukan Mesir oleh Amr bin Ash juga penting karena memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai karakter ekspansi Islam awal. Berbagai studi orientalis pada masa lalu sering menggambarkan ekspansi Islam semata-mata sebagai penaklukan militer yang didorong oleh motif ekonomi dan politik (Crone, 2004). Namun, penelitian sejarah kontemporer menunjukkan bahwa ekspansi Islam merupakan fenomena multidimensional yang melibatkan aspek agama, politik, sosial, ekonomi, dan budaya secara bersamaan. Oleh karena itu, analisis terhadap strategi, proses, dan dampak penaklukan Mesir perlu dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan sejarah kritis.

Dalam konteks historiografi modern, penaklukan Mesir oleh Amr bin Ash juga menjadi contoh bagaimana sebuah peristiwa sejarah dapat dipahami melalui berbagai perspektif. Sumber-sumber Islam klasik seperti karya al-Tabari, al-Baladhuri, dan Ibn Abd al-Hakam memberikan narasi yang menekankan aspek religius dan heroisme para sahabat, sedangkan sumber Bizantium dan kajian akademik modern lebih menyoroti faktor politik, ekonomi, dan sosial (Kaegi, 2021). Perbedaan perspektif tersebut memperkaya pemahaman sejarah dan menunjukkan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam studi sejarah Islam.

Dengan demikian, penaklukan Mesir oleh Amr bin Ash bukan hanya merupakan episode penting dalam sejarah militer Islam, tetapi juga menjadi salah satu fondasi utama pembentukan peradaban Islam klasik. Keberhasilan ekspedisi ini mengubah peta politik dunia, memperluas pengaruh Islam ke Afrika dan Eropa, memperkuat basis ekonomi kekhalifahan, serta membuka jalan bagi lahirnya pusat-pusat peradaban dan ilmu pengetahuan yang berpengaruh selama berabad-abad. Oleh karena itu, kajian mengenai strategi, proses, dan dampak penaklukan Mesir memiliki signifikansi yang sangat besar dalam memahami dinamika perkembangan peradaban Islam secara keseluruhan.

METODE

Penelitian yang berjudul *Penaklukan Mesir oleh Amr bin Ash: Strategi, Proses, dan Dampaknya terhadap Perkembangan Peradaban Islam* menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode kajian kepustakaan (*library research*). Dalam kajian sejarah Islam, penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang penting karena objek kajian sejarah tidak hanya dipahami sebagai rangkaian peristiwa kronologis, tetapi juga sebagai konstruksi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan keagamaan yang saling berkaitan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memahami peristiwa penaklukan Mesir tidak hanya dari aspek militer semata, tetapi juga dari perspektif historis, sosial, politik, ekonomi, dan peradaban (Bakri & Naj'ma, 2020).

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis secara mendalam berbagai fenomena historis yang berkaitan dengan proses penaklukan Mesir oleh Amr bin Ash, strategi yang digunakan, serta implikasinya terhadap perkembangan peradaban Islam. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk melakukan interpretasi secara komprehensif terhadap fakta-fakta sejarah melalui analisis terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan (Creswell, 2014). Metode kajian kepustakaan (*library research*) digunakan karena seluruh data penelitian diperoleh melalui penelusuran berbagai sumber tertulis, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer antara lain karya Ibn 'Abd al-Hakam, *Futūḥ Miṣr wa-Akḥbānuhā*, yang secara khusus memuat tradisi sejarah mengenai penaklukan dan perkembangan awal Mesir Islam, karya al-Balādhurī yang judul *Futūḥ al-Buldān* serta buku al-Ṭabarī. Sedangkan sumber sekunder berupa karya para sejarawan dan peneliti modern seperti tulisan Walter E. Kaegi, *Byzantium and the Early Islamic Conquests*; Fred M. Donner, *The Early Islamic Conquests*; Hugh Kennedy, *The Great Arab Conquests* dan kajiannya mengenai Mesir sebagai provinsi dalam kekhalifahan Islam; Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*; Peter Sheehan, *Babylon of Egypt*.

Sedangkan kajian kepustakaan memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi mendalam terhadap dokumen-dokumen historis, karya historiografi klasik Islam, penelitian akademik modern, artikel jurnal ilmiah, serta berbagai referensi lain yang relevan dengan tema penelitian (Abdurahman, 2011).

Proses penelitian dilakukan melalui empat tahapan utama penelitian sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Gottschalk, 1964). Tahap pertama, heuristik, dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan penaklukan Mesir pada abad ke-7 M. Beberapa sumber yang menjadi sumber *library research* antara lain; Walter E. Kaegi, *Byzantium and the Early*

Islamic Conquests, Hugh Kennedy, The Great Arab Conquests, Fred M. Donner, The Early Islamic Conquests, Ira M. Lapidus, A History of Islamic Societies, Marshall G. S. Hodgson, The Venture of Islam dan Philip K. Hitti, History of the Arabs. Tahap kedua adalah kritik sumber, yang dilakukan untuk menilai kredibilitas, relevansi, dan keterbatasan informasi yang diperoleh. Tahap ketiga adalah interpretasi, yaitu proses menganalisis dan menafsirkan fakta-fakta sejarah yang telah melalui kritik sumber. Peneliti menganalisis isi berbagai sumber tertulis dengan membandingkan informasi, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan narasi, menelaah konteks politik dan sosial yang melatarbelakangi suatu peristiwa, serta mengkaji kemungkinan bias, kepentingan, dan keterbatasan masing-masing sumber. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada pertanyaan “apa yang terjadi”, tetapi juga berusaha menjawab “mengapa peristiwa itu terjadi,” “bagaimana prosesnya berlangsung,” dan “apa makna serta dampaknya bagi perkembangan peradaban Islam.” Tahap *keempat* adalah historiografi, yaitu penyusunan hasil penelitian ke dalam bentuk narasi sejarah yang sistematis dan argumentatif. Fakta-fakta yang telah diverifikasi dan diinterpretasikan disusun berdasarkan hubungan kronologis dan tematis sehingga menghasilkan rekonstruksi mengenai strategi, proses, dan dampak penaklukan Mesir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar belakang Penaklukan Mesir oleh Amr bin Ash.

Penaklukan Mesir oleh pasukan Muslim di bawah pimpinan Amr bin Ash pada tahun 639–642 M merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah ekspansi Islam awal. Peristiwa ini tidak hanya mengubah peta politik kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, tetapi juga menjadi titik balik dalam sejarah peradaban Mediterania. Keberhasilan penaklukan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dinamika internal Kekhalifahan Islam maupun kondisi politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan Kekaisaran Bizantium yang sedang mengalami kemunduran. Oleh karena itu, memahami latar belakang penaklukan Mesir memerlukan kajian yang komprehensif terhadap situasi geopolitik abad ke-7 M.

Kondisi Politik Dunia pada Abad ke-7 M

Pada awal abad ke-7 M, kawasan Timur Tengah dikuasai oleh dua kekuatan besar dunia, yaitu Kekaisaran Bizantium di sebelah barat dan Kekaisaran Sasaniah Persia di sebelah timur. Kedua imperium tersebut telah terlibat dalam peperangan berkepanjangan selama lebih dari dua dekade (602–628 M), yang menyebabkan kerugian besar di bidang militer, ekonomi, dan sosial. Perang tersebut berakhir dengan kemenangan Bizantium di bawah Kaisar Heraklius, tetapi kemenangan itu diperoleh dengan harga yang sangat mahal (Kennedy, 2007). Kondisi tersebut menciptakan situasi yang menguntungkan bagi munculnya kekuatan baru, yaitu negara Islam yang dipimpin oleh para khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 M. Dalam waktu singkat, pasukan Muslim berhasil mengalahkan Persia dan merebut wilayah Syam dari Bizantium. Kemenangan besar dalam Pertempuran Yarmuk pada tahun 636 M secara efektif mengakhiri dominasi Bizantium di Suriah dan Palestina (Donner, 1981).

Setelah keberhasilan di Syam, perhatian para pemimpin Muslim mulai tertuju pada Mesir, yang saat itu merupakan salah satu provinsi terkaya dan terpenting bagi Kekaisaran Bizantium. Amr bin Ash, yang pernah melakukan perjalanan dagang ke Mesir sebelum Islam, memahami dengan baik kondisi geografis, ekonomi, dan politik wilayah tersebut. Ia kemudian mengusulkan kepada Khalifah Umar bin Khattab agar Mesir dijadikan target ekspansi berikutnya (Hitti, 1970).

Posisi Strategis Mesir

Mesir memiliki posisi strategis yang sangat penting sejak masa kuno. Secara geografis, wilayah ini menjadi penghubung antara Asia, Afrika, dan kawasan Mediterania. Sungai Nil yang subur menjadikan Mesir sebagai salah satu pusat produksi pertanian terbesar di dunia kuno. Bahkan, sejak masa Romawi, Mesir dikenal sebagai “lumbung gandum” kekaisaran karena menyuplai sebagian besar kebutuhan pangan Konstantinopel (Butler, 1902). Selain faktor ekonomi, Mesir juga memiliki arti strategis dari aspek militer. Penguasaan Mesir akan memberikan kontrol terhadap jalur perdagangan Laut Merah dan Mediterania Timur. Dengan demikian, jika Mesir jatuh ke tangan Muslim, maka posisi Bizantium di Afrika Utara dan Laut Tengah akan semakin terancam (Kennedy, 2007). Bagi Kekhalifahan Islam, penguasaan Mesir tidak hanya berarti perluasan wilayah, tetapi juga pembentukan basis ekonomi dan militer yang kuat untuk ekspansi lebih lanjut ke Afrika Utara. Oleh karena itu, Mesir dipandang sebagai wilayah yang sangat strategis dalam kebijakan ekspansi Khalifah Umar bin Khattab.

Melemahnya Kekaisaran Bizantium

Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi keberhasilan penaklukan Mesir adalah melemahnya Kekaisaran Bizantium. Setelah perang panjang melawan Persia, kekuatan militer Bizantium mengalami penurunan yang signifikan. Banyak wilayah mengalami kerusakan, pendapatan negara menurun, dan kemampuan mempertahankan daerah perbatasan semakin lemah (Kaegi, 1992). Kaisar Heraklius memang berhasil merebut kembali wilayah yang sempat dikuasai Persia, tetapi upaya rekonstruksi pascaperang membutuhkan biaya yang sangat besar. Akibatnya, pemerintah Bizantium meningkatkan pajak kepada rakyat di berbagai provinsi, termasuk Mesir. Kebijakan tersebut menimbulkan ketidakpuasan yang luas di kalangan penduduk lokal.

Selain itu, pasukan Bizantium yang ditempatkan di Mesir jumlahnya relatif terbatas. Sebagian besar kekuatan militer kekaisaran masih terkonsentrasi di wilayah Anatolia dan Balkan. Kondisi ini menyebabkan pertahanan Mesir menjadi rentan terhadap serangan pasukan Muslim yang bergerak cepat dan fleksibel (Donner, 1981).

Konflik Keagamaan di Mesir

Faktor lain yang sangat penting adalah konflik keagamaan antara pemerintah Bizantium dan penduduk asli Mesir, terutama komunitas Kristen Koptik. Sejak Konsili Chalcedon tahun 451 M, terjadi perpecahan teologis antara Gereja Bizantium yang menganut ajaran Chalcedonian dan Gereja Koptik Mesir yang menganut Miaphysitisme (Atiya, 1968). Pemerintah Bizantium berusaha memaksakan doktrin resmi negara kepada masyarakat Koptik melalui berbagai kebijakan represif. Banyak pemimpin agama Koptik mengalami penganiayaan, pengasingan, dan diskriminasi politik. Patriark Benjamin I, misalnya, terpaksa hidup dalam persembunyian selama bertahun-tahun karena tekanan dari pemerintah Bizantium (Butler, 1902).

Akibatnya, sebagian besar masyarakat Mesir tidak memiliki loyalitas yang kuat terhadap pemerintahan Bizantium. Ketika pasukan Muslim datang, banyak penduduk lokal tidak memberikan perlawanan berarti. Bahkan, beberapa komunitas Koptik melihat pemerintahan Islam sebagai alternatif yang lebih toleran dibandingkan kekuasaan Bizantium.

Faktor Ekonomi dan Beban Pajak

Sistem perpajakan Bizantium di Mesir dikenal sangat berat. Pemerintah pusat di Konstantinopel menjadikan Mesir sebagai sumber pendapatan utama untuk membiayai administrasi dan militer kekaisaran. Pajak tanah, pajak perdagangan, dan berbagai pungutan lainnya dibebankan kepada masyarakat secara berlebihan (Lapidus, 2014). Beban ekonomi tersebut semakin berat setelah perang Bizantium-Persia. Banyak petani kehilangan tanah dan mengalami kemiskinan. Dalam situasi demikian, kedatangan pemerintahan Islam yang menawarkan sistem pajak baru, seperti jizyah dan kharaj yang lebih teratur, dipandang sebagai perubahan yang dapat memberikan stabilitas ekonomi (Donner, 1981). Selain itu, kebijakan pemerintahan Islam yang umumnya mempertahankan struktur ekonomi lokal tanpa melakukan perampasan besar-besaran turut membantu terciptanya stabilitas pasca-penaklukan. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa transisi kekuasaan di Mesir berlangsung relatif cepat dibandingkan wilayah lainnya.

Kepentingan Strategis Kekhalifahan Islam

Perspektif Kekhalifahan Islam, penaklukan Mesir memiliki beberapa tujuan strategis. Pertama, mengamankan wilayah Syam yang baru saja ditaklukkan dari kemungkinan serangan balik Bizantium. Selama Mesir masih berada di bawah kekuasaan Bizantium, wilayah Syam tetap berada dalam ancaman (Kaegi, 1992). Kedua, memperluas basis ekonomi negara Islam. Mesir memiliki sumber daya pertanian yang sangat besar, sehingga penguasaannya akan meningkatkan kemampuan fiskal negara Islam yang sedang berkembang (Hitti, 1970). Ketiga, membuka jalur ekspansi ke Afrika Utara. Penaklukan Mesir menjadi titik awal bagi ekspansi Islam menuju Libya, Tunisia, Aljazair, hingga Maroko pada abad berikutnya. Dengan demikian, penaklukan Mesir merupakan bagian dari strategi geopolitik jangka panjang Kekhalifahan Rasyidah (Lapidus, 2014).

Proses dan Strategi Penaklukan Mesir

Pengepungan Benteng Babilonia

Persiapan militer penaklukan Mesir dilakukan secara sederhana tetapi efektif. Amr bin Ash memimpin

pasukan yang relatif kecil dibandingkan dengan ukuran wilayah yang akan ditaklukkan. Pada akhir tahun 639 M, ia berangkat dari Palestina dengan sekitar 3.500 hingga 4.000 tentara (Butler, 1902). Pasukan ini terdiri dari para veteran perang yang sebelumnya telah terlibat dalam berbagai pertempuran besar melawan Bizantium di Syam. Mereka memiliki pengalaman tempur yang tinggi, disiplin yang kuat, serta mobilitas yang cepat. Karakteristik utama pasukan Muslim pada periode ini adalah kemampuan bergerak secara fleksibel, memanfaatkan medan, dan melakukan serangan mendadak. Persenjataan pasukan Muslim meliputi: Pedang (saif), Tombak (rumh), Busur panah, Perisai, Kuda perang dan unta sebagai sarana mobilitas.

Berbeda dengan tentara Bizantium yang memiliki struktur militer besar dan birokratis, pasukan Muslim mengandalkan kepemimpinan langsung, disiplin agama, serta kemampuan adaptasi terhadap medan perang.¹¹ Dalam perjalanan menuju Mesir, Amr bin Ash juga melakukan persiapan logistik yang cermat. Ia memilih jalur Sinai yang relatif aman serta memastikan pasukannya memperoleh suplai dari wilayah Palestina yang telah dikuasai Muslim. Strategi ini memungkinkan pasukan bergerak dengan cepat dan mengurangi ketergantungan pada jalur logistik yang panjang (Donner, 1981).

Salah satu episode paling terkenal dalam awal penaklukan Mesir adalah peristiwa surat Khalifah Umar kepada Amr bin Ash. Menurut riwayat sejarah, setelah Amr berangkat menuju Mesir, Umar kembali merasa ragu terhadap keputusan tersebut dan mengirim surat yang berisi instruksi agar Amr kembali jika belum memasuki wilayah Mesir (Juynboll, 2015). Ketika surat itu tiba, Amr bin Ash diduga telah mengetahui kemungkinan isi surat tersebut. Oleh karena itu, ia menunda pembukaan surat sampai pasukannya memasuki wilayah Arisy, yang dianggap sudah termasuk wilayah Mesir. Setelah membaca isi surat, Amr menyatakan bahwa mereka telah berada di wilayah tujuan sehingga ekspedisi harus dilanjutkan. Meskipun kisah ini masih diperdebatkan oleh sebagian sejarawan modern, narasi tersebut menggambarkan karakter Amr sebagai seorang panglima yang berani, cerdas, dan memiliki kemampuan mengambil keputusan strategis secara cepat (Kaegi, 1992).

Pasukan Muslim memasuki Mesir melalui Sinai pada akhir tahun 639 M. Kota pertama yang mereka kuasai adalah Farama (Pelusium), sebuah benteng penting yang menjaga pintu masuk timur Mesir. Pertempuran di Farama berlangsung sekitar satu bulan sebelum akhirnya kota tersebut jatuh ke tangan pasukan Muslim (Butler, 1902). Keberhasilan merebut Farama memiliki arti strategis yang sangat besar karena: (a) Membuka jalur menuju Delta Nil. (b) Memutus sistem pertahanan timur Bizantium. (c) Menjadi basis logistik bagi pasukan Muslim. (d) Menurunkan moral pasukan Bizantium di Mesir.

Setelah menguasai Farama, Amr melanjutkan gerakannya menuju Bilbais. Kota ini memiliki pertahanan yang lebih kuat dan dipimpin oleh garnisun Bizantium yang cukup besar. Pertempuran Bilbais berlangsung selama sekitar satu bulan dan berakhir dengan kemenangan pasukan Muslim (Al-Baladhuri, 1916). Kemenangan di Bilbais semakin memperkuat posisi Amr. Selain memperoleh keuntungan militer, kemenangan ini juga menunjukkan kepada penduduk lokal bahwa kekuasaan Bizantium mulai mengalami kemunduran. Sebagian masyarakat Koptik bahkan memilih bersikap netral atau memberikan dukungan tidak langsung kepada pasukan Muslim karena ketidakpuasan mereka terhadap pemerintahan Bizantium (Kennedy, 2007). Pertempuran Heliopolis menjadi titik balik yang penting. Dalam pertempuran ini, pasukan Bizantium mengalami kekalahan besar, yang memaksa sisa pasukan mereka mundur dan berlindung di Benteng Babylon. Kekalahan tersebut sekaligus menghilangkan kemampuan Bizantium untuk melakukan operasi ofensif besar di Mesir.

Pengepungan Benteng Babilonia (Babylon Fortress atau *Qaṣr al-Sham'*) pada tahun 640–641 M merupakan tahap paling menentukan dalam penaklukan Mesir oleh pasukan Muslim di bawah komando Amr bin Ash. Benteng ini merupakan pusat pertahanan utama Kekaisaran Bizantium di Mesir bagian bawah sekaligus gerbang menuju Alexandria, ibu kota administratif Bizantium di Mesir. Keberhasilan merebut benteng tersebut membuka jalan bagi penguasaan seluruh Mesir dan menjadi salah satu kemenangan strategis terbesar dalam ekspansi Islam awal (Donner, 1981). Pengepungan Benteng Babilonia dimulai sekitar Agustus atau September 640 M, setelah banjir Sungai Nil mulai surut. Pasukan Muslim mendirikan perkemahan permanen di sekitar benteng dan mulai memutus jalur komunikasi antara Babilonia dengan wilayah Bizantium lainnya (Kennedy, 1998). Kondisi benteng sangat menguntungkan pihak Bizantium. Tembok pertahanannya tinggi dan tebal, sementara pasukan Muslim tidak memiliki peralatan pengepungan berat seperti *catapult* atau *siege tower* yang lazim digunakan dalam peperangan Bizantium (Kaegi, 2021). Akibatnya, Amr bin Ash memilih strategi pengepungan berkepanjangan (*war of attrition*) untuk melemahkan pertahanan musuh secara bertahap. Selama

masa pengepungan, pasukan Muslim melakukan beberapa langkah strategis, yaitu: (a) Memutus suplai logistik Bizantium; (b) Mengisolasi benteng dari bantuan eksternal; (c) Melakukan patroli intensif di sekitar Sungai Nil; (d) Menguasai wilayah pedesaan sekitar untuk memperoleh dukungan logistik (Donner, 1981).

Di tengah pengepungan, terjadi beberapa upaya negosiasi antara Amr bin Ash dan Cyrus al-Muqawqis (al-Muqawqis), pejabat Bizantium sekaligus Patriark Alexandria (Butler, 1902). Menurut sumber-sumber Arab klasik, Cyrus berupaya melakukan perundingan damai guna menghindari kehancuran lebih lanjut. Dalam negosiasi tersebut, Amr bin Ash menawarkan tiga pilihan: (a) menerima Islam, (b) membayar jizyah dan tunduk kepada pemerintahan Islam, atau (c) melanjutkan peperangan (Ibn 'Abd al-Hakam, 1968). Perundingan berlangsung cukup panjang dan beberapa kali mengalami kegagalan karena adanya perbedaan pandangan di kalangan elite Bizantium sendiri. Sebagian pejabat Bizantium ingin melanjutkan perlawanan, sedangkan sebagian lainnya menganggap perang sudah tidak mungkin dimenangkan (Kaegi, 2021). Ketidakmampuan Bizantium mencapai kesepakatan internal justru memberikan keuntungan bagi pasukan Muslim. Perpecahan politik dan militer dalam kubu Bizantium semakin memperlemah kemampuan pertahanan benteng (al-Tabari, 1967).

Seiring berjalannya waktu, kondisi di dalam benteng semakin memburuk. Pasukan Bizantium mulai mengalami: (a) kekurangan bahan makanan, (b) menurunnya persediaan senjata, (c) meningkatnya penyakit, (d) turunnya moral pasukan, dan (e) hilangnya harapan datangnya bantuan dari Konstantinopel (Butler, 1902). Situasi semakin memburuk setelah Kaisar Heraklius meninggal dunia pada Februari 641 M. Kematian sang kaisar menimbulkan ketidakpastian politik di pusat pemerintahan Bizantium dan menghilangkan harapan garnisun Babilonia akan datangnya bala bantuan (Kaegi, 2021).

Sebaliknya, kondisi pasukan Islam makin kuat dengan kedatangan pasukan tambahan tambahan sekitar 12.000 orang yang dipimpin oleh beberapa sahabat senior, termasuk Zubair bin Awwam, Ubadah bin Shamit, Miqdad bin al-Aswad, dan Maslamah bin Mukhalad (al-Tabari, 1967). Kedatangan pasukan tambahan ini mengubah keseimbangan kekuatan secara signifikan. Selain memperbesar jumlah pasukan, kehadiran para sahabat senior juga meningkatkan moral dan semangat juang tentara Muslim. Di antara para komandan tersebut, Zubair bin Awwam memainkan peranan penting dalam fase akhir pengepungan. Ia dikenal sebagai panglima yang berani dan memiliki pengalaman tempur yang sangat luas sejak masa Nabi Muhammad SAW. (Kennedy, 2022).

Benteng Babilonia jebol setelah diserang oleh Zubair bin Awwam. Menurut tradisi sejarah Islam yang diriwayatkan oleh Ibn Abd al-Hakam dan al-Baladhuri, fase terakhir pengepungan terjadi ketika Zubair bin Awwam memimpin sekelompok kecil pasukan untuk memanjat dinding benteng pada malam hari menggunakan tangga (Ibn 'Abd al-Hakam, 1968). Setelah berhasil mencapai puncak benteng, pasukan Muslim menyerang garnisun dari dalam sambil meneriakkan takbir. Serangan mendadak tersebut menimbulkan kepanikan di kalangan tentara Bizantium. Meskipun beberapa sejarawan modern menilai detail penyerbuan ini mungkin mengalami glorifikasi dalam tradisi Islam klasik, terdapat konsensus bahwa kombinasi pengepungan berkepanjangan, melemahnya moral Bizantium, dan operasi militer akhir berhasil memaksa benteng menyerah. Benteng Babilonia akhirnya jatuh pada bulan April 641 M (Rabi' al-Ākhir 20 H), setelah pengepungan yang berlangsung sekitar tujuh bulan (Kennedy, 2007).

Jatuhnya Benteng Babilonia memiliki konsekuensi strategis yang sangat besar. Pertama, Bizantium kehilangan pusat pertahanan utamanya di Mesir bagian dalam. Kedua, jalur menuju Alexandria terbuka bagi pasukan Muslim. Ketiga, kemenangan ini mempercepat runtuhnya kekuasaan Bizantium di Mesir (Hodgson, 1974). Setelah kemenangan tersebut, Amr bin Ash mendirikan kota Fustat di dekat benteng sebagai pusat pemerintahan Islam pertama di Mesir. Kota ini kemudian berkembang menjadi salah satu pusat politik, ekonomi, dan intelektual terbesar dunia Islam (Sheehan, 2010). Dari perspektif sejarah militer, pengepungan Benteng Babilonia menunjukkan keberhasilan strategi Islam awal yang menggabungkan beberapa hal seperti mobilitas militer, perang psikologis, diplomasi, pengepungan jangka panjang, pemanfaatan kelemahan politik lawan, serta kemampuan adaptasi terhadap kondisi lokal (Donner, 1981).

Penyerahan Aleksandria: Akhir Kekuasaan Bizantium dan Konsolidasi Islam di Mesir

Penyerahan Aleksandria merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah ekspansi Islam awal pada abad ke-7 Masehi. Peristiwa ini tidak hanya menandai berakhirnya dominasi Kekaisaran Bizantium di

Mesir, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam transformasi politik, ekonomi, dan kebudayaan kawasan Mediterania Timur. Kota Aleksandria, yang sejak masa Aleksander Agung dan dinasti Ptolemaios telah menjadi pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dunia kuno, jatuh ke tangan kaum Muslim di bawah komando Amr bin Ash pada tahun 642 M. Penyerahan kota ini menjadi simbol berakhirnya era klasik Mediterania Timur dan awal integrasi Mesir ke dalam peradaban Islam.

Kajian tentang penyerahan Aleksandria tidak hanya berkaitan dengan aspek militer, tetapi juga melibatkan dimensi politik, sosial, ekonomi, dan keagamaan. Peristiwa ini terjadi dalam konteks melemahnya Kekaisaran Bizantium akibat perang panjang melawan Persia Sasaniyah serta munculnya kekuatan baru Islam yang berhasil menyatukan Jazirah Arab di bawah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Aleksandria didirikan oleh Aleksander Agung pada tahun 331 SM dan berkembang menjadi salah satu kota terbesar di dunia kuno. Kota ini menjadi ibu kota Dinasti Ptolemaios dan terkenal sebagai pusat perdagangan internasional, filsafat, ilmu pengetahuan, serta kebudayaan Helenistik. Perpustakaan Aleksandria dan Museum Aleksandria menjadikan kota tersebut sebagai pusat intelektual dunia selama berabad-abad (Hitti, 1970).

Setelah Mesir jatuh ke tangan Romawi pada tahun 30 SM, Aleksandria tetap mempertahankan posisinya sebagai kota pelabuhan utama di Laut Tengah. Ketika Kekaisaran Romawi terbagi, kota ini menjadi bagian dari Kekaisaran Bizantium dan berfungsi sebagai pusat administrasi, perdagangan, dan agama Kristen di Mesir (Kennedy, 2007). Secara ekonomi, Aleksandria sangat penting karena menjadi pusat distribusi gandum Mesir, yang merupakan salah satu sumber pangan utama bagi Konstantinopel. Oleh karena itu, penguasaan Aleksandria memiliki arti strategis bagi stabilitas ekonomi dan politik Bizantium.

Pada awal abad ke-7 M, Kekaisaran Bizantium mengalami krisis yang berkepanjangan. Perang Bizantium-Persia yang berlangsung antara tahun 602–628 M menyebabkan kerusakan ekonomi dan melemahkan kekuatan militer kekaisaran. Meskipun Kaisar Heraklius berhasil mengalahkan Persia, kemenangan tersebut diperoleh dengan biaya yang sangat besar (Treadgold, 1997). Selain masalah eksternal, Bizantium juga menghadapi konflik internal, khususnya pertentangan teologis antara gereja resmi Bizantium yang menganut doktrin Khalkedon dan mayoritas penduduk Mesir yang mengikuti ajaran Monofisit atau Gereja Koptik. Kebijakan represif Bizantium terhadap umat Kristen Koptik menyebabkan munculnya ketidakpuasan yang mendalam di kalangan masyarakat Mesir (Lapidus, 2014). Sementara itu, di Jazirah Arab, Islam telah berkembang menjadi kekuatan politik dan militer yang besar setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 M. Di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, ekspansi Islam berlangsung dengan cepat ke wilayah Syam, Irak, Persia, dan Mesir.

Setelah berhasil menguasai wilayah pedalaman Mesir, Amr bin Ash bergerak menuju Aleksandria. Kota ini memiliki pertahanan yang sangat kuat dengan benteng, tembok tinggi, dan akses laut yang memungkinkan bantuan dari Konstantinopel. Pengepungan Aleksandria berlangsung selama 14 bulan sejak tahun 461-462 M. Pasukan Bizantium melakukan perlawanan sengit, sementara pasukan Muslim berusaha memutus jalur komunikasi dan suplai. Dalam kondisi tersebut, Kaisar Heraklius tidak mampu mengirimkan bantuan yang memadai karena berbagai kesulitan internal yang dihadapi kekaisaran (Norwich, 1996). Selain faktor militer, kondisi politik internal Bizantium juga mempercepat proses penyerahan. Banyak elite lokal menyadari bahwa mempertahankan Aleksandria akan membutuhkan biaya dan korban yang sangat besar, sementara peluang kemenangan semakin kecil.

Pada tahun 642 M, dicapai kesepakatan penyerahan antara pihak Bizantium dan pasukan Muslim. Berdasarkan perjanjian tersebut, tentara Bizantium diberikan waktu untuk meninggalkan kota melalui jalur laut, sedangkan penduduk sipil memperoleh jaminan keamanan atas jiwa, harta benda, dan kebebasan beragama mereka (Al-Baladhuri, 1916). Perjanjian ini mencerminkan praktik diplomasi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin yang relatif fleksibel dan pragmatis. Penduduk setempat diperbolehkan mempertahankan gereja, tradisi, dan struktur sosial mereka dengan kewajiban membayar jizyah sesuai ketentuan yang berlaku. Penyerahan Aleksandria berlangsung relatif damai dibandingkan dengan banyak penaklukan besar dalam sejarah kuno. Hal ini turut menjelaskan mengapa proses integrasi Mesir ke dalam pemerintahan Islam berlangsung relatif cepat.

Meskipun Aleksandria telah jatuh pada tahun 642 M, Kekaisaran Bizantium belum sepenuhnya menyerah. Pada tahun 645 M, armada Bizantium berhasil merebut kembali kota tersebut melalui serangan mendadak (Donner, 1981). Namun, keberhasilan ini hanya berlangsung singkat. Amr bin Ash segera memimpin operasi militer balasan dan berhasil menguasai kembali Aleksandria pada tahun 646 M. Setelah peristiwa tersebut, Bizantium tidak pernah lagi berhasil memperoleh kembali kendali atas Mesir. Kekalahan ini menandai

berakhirnya kekuasaan Bizantium di Afrika Utara bagian timur dan mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan Mediterania.

Penyerahan Aleksandria membawa dampak politik yang sangat besar. *Pertama*, peristiwa ini mengakhiri lebih dari enam abad kekuasaan Yunani-Romawi di Mesir. *Kedua*, Mesir menjadi salah satu provinsi terpenting dalam kekhalifahan Islam (Lapidus, 2014). Mesir kemudian berkembang menjadi basis strategis bagi ekspansi Islam ke Afrika Utara. Dari wilayah ini, pasukan Muslim melanjutkan penaklukan ke Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, hingga Semenanjung Iberia. Selain itu, keberhasilan menguasai Mesir meningkatkan legitimasi politik Kekhalifahan Rasyidin dan memperkuat posisi Khalifah Umar bin Khattab sebagai pemimpin negara yang sedang berkembang menjadi kekuatan global.

Dari sisi ekonomi, penguasaan Aleksandria memberikan keuntungan besar bagi negara Islam. Mesir merupakan salah satu wilayah pertanian paling produktif di dunia pada masa itu. Produksi gandum Mesir menjadi sumber pendapatan yang sangat penting bagi kas negara (Hodgson, 1974). Pelabuhan Aleksandria juga memungkinkan kaum Muslim mengembangkan perdagangan maritim di Laut Tengah. Jalur perdagangan yang sebelumnya dikuasai Bizantium secara bertahap mulai terintegrasi ke dalam jaringan ekonomi Islam. Peningkatan aktivitas perdagangan ini turut mendorong pertumbuhan kota-kota baru seperti Fustat, yang kemudian berkembang menjadi pusat pemerintahan Islam di Mesir.

Penyerahan Aleksandria juga menghasilkan perubahan sosial yang signifikan. Pemerintahan Islam pada umumnya mempertahankan struktur sosial yang sudah ada dan tidak memaksakan konversi agama secara massal (Hourani, 1991). Komunitas Kristen Koptik memperoleh ruang yang lebih luas dibandingkan masa pemerintahan Bizantium. Banyak sejarawan berpendapat bahwa sebagian masyarakat Mesir menerima pemerintahan Islam karena kebijakan perpajakan dan keagamaan yang dianggap lebih toleran dibandingkan pemerintahan sebelumnya (Lewis, 2002).

Faktor-faktor Keberhasilan Penaklukan Mesir

Keberhasilan penaklukan Mesir oleh Amr bin Ash pada tahun 639–642 M merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah ekspansi Islam awal. Keberhasilan ini tidak dapat dijelaskan hanya melalui superioritas militer semata, melainkan merupakan hasil dari perpaduan berbagai faktor politik, militer, sosial, ekonomi, psikologis, dan keagamaan yang saling berkaitan. Para sejarawan modern seperti Fred M. Donner, Hugh Kennedy, Walter E. Kaegi, dan Alfred J. Butler menegaskan bahwa kemenangan pasukan Muslim di Mesir merupakan konsekuensi dari kemampuan strategis kepemimpinan Islam yang berhasil memanfaatkan kelemahan internal Bizantium dan kondisi sosial masyarakat Mesir saat itu (Donner, 1981).

Kepemimpinan dan Strategi Militer Amr bin Ash

Salah satu faktor utama keberhasilan penaklukan Mesir adalah kepemimpinan Amr bin Ash yang memiliki kemampuan militer, politik, dan diplomasi yang luar biasa. Sebelum memeluk Islam, Amr telah dikenal sebagai diplomat dan pedagang Quraisy yang memiliki pengalaman luas dalam hubungan internasional. Pengalamannya berinteraksi dengan berbagai wilayah menjadikan dirinya memahami kondisi geopolitik Timur Tengah secara mendalam (Kennedy, 2007). Sebagai panglima perang, Amr bin Ash menerapkan strategi perang yang fleksibel dan adaptif. Berbeda dengan model peperangan konvensional Bizantium yang mengandalkan formasi besar dan pertahanan benteng, Amr lebih menekankan pada mobilitas tinggi, perang psikologis, dan penguasaan jalur komunikasi. Ia mampu memanfaatkan kecepatan gerak pasukan untuk menyerang titik-titik strategis sebelum musuh dapat mengorganisasi pertahanan yang efektif (Kaegi, 2022).

Dengan demikian, kepemimpinan Amr bin Ash dapat dipahami bukan sekadar sebagai faktor personal berupa keberanian atau kecakapan sebagai panglima, melainkan sebagai kemampuan mengintegrasikan pengalaman, informasi, strategi militer, dan diplomasi. Pengalaman interaksi dengan berbagai kelompok memberikan modal sosial dan politik yang membantu Amr memahami lingkungan yang dihadapinya, sedangkan kemampuan adaptasi memungkinkan strategi penaklukan disesuaikan dengan kondisi Mesir. Hubungan antara pengalaman biografis dan tindakan strategis inilah yang menjadikan aspek kepemimpinan Amr penting untuk dianalisis dalam menjelaskan keberhasilan penaklukan Mesir.

Keberhasilan merebut Benteng Babilon (Babylon Fortress), misalnya, menunjukkan kemampuan Amr dalam menggabungkan pengepungan militer dengan negosiasi politik. Pendekatan ini memungkinkan pasukan

Muslim memperoleh kemenangan dengan kerugian yang relatif kecil dibandingkan peperangan konvensional pada masa itu (Butler, 1902). Selain itu, Amr memiliki kemampuan membaca kondisi sosial-politik lokal. Ia memahami bahwa masyarakat Mesir, khususnya kaum Koptik, memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan pemerintahan Bizantium. Oleh karena itu, ia lebih banyak menggunakan pendekatan persuasif daripada represif, sehingga memperoleh simpati dari sebagian masyarakat setempat.

Kepemimpinan Politik Khalifah Umar bin Khattab

Faktor penting lainnya adalah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab yang terkenal dengan kebijakan politik dan administrasi yang rasional serta visioner. Meskipun pada awalnya Umar sempat ragu untuk mengirim pasukan ke Mesir karena mempertimbangkan risiko militer yang besar, ia akhirnya menyetujui ekspedisi tersebut setelah menerima berbagai pertimbangan strategis dari Amr bin Ash (Donner, 1981). Umar menerapkan sistem pemerintahan yang memungkinkan koordinasi militer berlangsung secara efektif. Ia memberikan kebebasan taktis kepada panglima di lapangan, tetapi tetap melakukan pengawasan strategis secara ketat. Sistem komunikasi yang dibangun antara Madinah dan front pertempuran memungkinkan pengambilan keputusan yang relatif cepat dan tepat (Lapidus, 2014).

Selain itu, Umar juga memberikan dukungan logistik dan personel tambahan ketika diperlukan. Pengiriman pasukan bantuan di bawah pimpinan Zubair bin Awwam menjadi salah satu faktor penting yang mempercepat jatuhnya benteng-benteng Bizantium di Mesir (Al-Tabari, 1967).

Melemahnya Kekaisaran Bizantium

Keberhasilan penaklukan Mesir tidak dapat dilepaskan dari kondisi Kekaisaran Bizantium yang sedang mengalami kemunduran. Pada awal abad ke-7 M, Bizantium baru saja menyelesaikan perang panjang melawan Kekaisaran Sasaniyah Persia yang berlangsung hampir tiga dekade (602–628 M). Perang tersebut mengakibatkan kerugian besar dalam bidang ekonomi, militer, dan politik (Kaegi, 1992). Meskipun Kaisar Heraklius berhasil memenangkan perang melawan Persia, kemenangan tersebut diperoleh dengan biaya yang sangat mahal. Banyak wilayah Bizantium mengalami kehancuran ekonomi, sementara angkatan bersenjata kehilangan sebagian besar personel dan perlengkapannya. Akibatnya, ketika pasukan Muslim mulai melakukan ekspansi, Bizantium tidak lagi memiliki kapasitas militer yang cukup untuk mempertahankan seluruh wilayah kekuasaannya secara efektif.

Selain kelemahan ekonomi dan militer, Bizantium juga mengalami krisis administrasi. Pemerintah pusat di Konstantinopel mengalami kesulitan mengendalikan provinsi-provinsi yang jauh, termasuk Mesir. Kondisi ini memperlemah koordinasi pertahanan dan menyebabkan respons militer terhadap serangan Muslim menjadi lambat dan tidak efektif (Kaegi, 1992).

Ketidakpuasan Masyarakat Koptik terhadap Pemerintahan Bizantium

Faktor sosial merupakan salah satu aspek yang paling menentukan dalam keberhasilan penaklukan Mesir. Mayoritas penduduk Mesir pada abad ke-7 M adalah kaum Kristen Koptik yang memiliki perbedaan teologis dengan Gereja Ortodoks Bizantium. Kaum Koptik menganut ajaran Miaphysite, sedangkan pemerintah Bizantium menganut ajaran Chalcedonian. Perbedaan tersebut menyebabkan terjadinya diskriminasi agama yang berlangsung selama berabad-abad (Butler, 1902). Pemerintah Bizantium sering melakukan tekanan terhadap gereja Koptik, termasuk pengasingan pemimpin agama, pembatasan kebebasan beribadah, dan pengenaan pajak yang berat. Kebijakan ini menimbulkan ketidakpuasan yang mendalam di kalangan masyarakat Mesir (Berkey, 2003).

Ketika pasukan Muslim datang, sebagian besar masyarakat Koptik tidak memberikan perlawanan yang berarti. Bahkan dalam beberapa kasus, mereka memberikan dukungan logistik dan informasi kepada pasukan Muslim. Kebijakan toleransi agama yang diterapkan oleh Amr bin Ash membuat masyarakat lokal memandang pemerintahan Islam sebagai alternatif yang lebih baik dibandingkan pemerintahan Bizantium. Sejarawan Alfred J. Butler (1902), menyatakan bahwa kemenangan Islam di Mesir sebagian besar disebabkan oleh "keruntuhan legitimasi politik Bizantium di mata rakyat Mesir sendiri."

Mobilitas dan Organisasi Militer Pasukan Muslim

Keunggulan lain yang dimiliki pasukan Muslim adalah mobilitas militer yang sangat tinggi. Pasukan Islam terdiri atas prajurit yang terbiasa hidup dalam kondisi geografis yang keras di Jazirah Arab. Mereka memiliki kemampuan bergerak cepat dengan perlengkapan yang relatif ringan (Donner, 1981). Pasukan Muslim tidak

terlalu bergantung pada jalur logistik yang panjang seperti tentara Bizantium. Mereka menggunakan sistem suplai yang fleksibel dan mampu bertahan dalam kondisi lingkungan yang sulit. Keunggulan ini memungkinkan pasukan Islam melakukan manuver cepat, mengejutkan lawan, dan menghindari pertempuran frontal yang tidak menguntungkan.

Selain itu, struktur organisasi militer Islam bersifat lebih sederhana tetapi efektif. Hubungan antara pemimpin dan prajurit dibangun atas dasar loyalitas, kepercayaan, dan kesamaan tujuan. Kondisi ini menciptakan solidaritas yang kuat dalam tubuh pasukan Muslim (Lapidus, 2014).

Motivasi Ideologis dan Spiritualitas Pasukan Muslim

Aspek ideologis dan religius juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan penaklukan Mesir. Para prajurit Muslim meyakini bahwa perjuangan mereka merupakan bagian dari kewajiban agama dan pengabdian kepada Allah SWT. Motivasi spiritual ini menciptakan semangat juang yang tinggi dan ketahanan mental yang luar biasa dalam menghadapi berbagai kesulitan (Hodgson, 1974). Konsep jihad pada masa awal Islam tidak hanya dipahami sebagai peperangan fisik, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian dan perjuangan menegakkan keadilan. Motivasi religius tersebut menghasilkan disiplin, keberanian, dan solidaritas yang tinggi di kalangan pasukan Muslim (Donner, 2010). Sebaliknya, tentara Bizantium banyak terdiri atas pasukan bayaran dan prajurit dari berbagai etnis yang memiliki tingkat loyalitas berbeda-beda. Perbedaan motivasi ini turut mempengaruhi efektivitas tempur kedua belah pihak (Kaegi, 1992).

Letak Geografis dan Kondisi Strategis Mesir

Kondisi geografis Mesir turut memberikan keuntungan bagi pasukan Muslim. Sebagian besar aktivitas ekonomi dan pemukiman penduduk Mesir terkonsentrasi di sepanjang Sungai Nil. Dengan menguasai jalur komunikasi utama dan pusat-pusat administrasi, pasukan Muslim dapat secara efektif mengendalikan wilayah yang luas tanpa harus menduduki seluruh kawasan secara langsung (Hitti, 1970). Selain itu, gurun-gurun di sekitar Mesir justru menjadi keuntungan bagi pasukan Muslim yang telah terbiasa beroperasi di lingkungan serupa. Sebaliknya, tentara Bizantium mengalami kesulitan beradaptasi dengan kondisi geografis tersebut.

Kebijakan Pemerintahan Islam yang Moderat

Keberhasilan penaklukan Mesir juga disebabkan oleh kebijakan pemerintahan Islam yang relatif moderat terhadap penduduk yang ditaklukkan. Pemerintah Islam tidak melakukan penghancuran besar-besaran terhadap institusi sosial, ekonomi, dan agama yang telah ada sebelumnya (Lapidus, 2014). Kaum Koptik diberikan kebebasan menjalankan agama mereka dengan kewajiban membayar jizyah sebagai bentuk perlindungan negara. Kebijakan ini dipandang lebih ringan dibandingkan beban pajak yang sebelumnya diberlakukan oleh pemerintahan Bizantium. Sikap toleran tersebut mempercepat proses penerimaan masyarakat terhadap pemerintahan Islam dan menciptakan stabilitas politik yang diperlukan untuk pembangunan peradaban Islam di Mesir pada masa berikutnya.

Dampak penaklukan Mesir terhadap perkembangan peradaban Islam

Penaklukan Mesir oleh pasukan Islam di bawah pimpinan Amr ibn al-As pada tahun 639-642 M merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah perkembangan peradaban Islam. Keberhasilan penaklukan ini tidak hanya mengakhiri dominasi Kekaisaran Bizantium di wilayah Mesir, tetapi juga membawa perubahan besar dalam aspek politik, ekonomi, sosial, keagamaan, dan kebudayaan. Dampak-dampak tersebut berlangsung dalam jangka panjang dan berkontribusi pada pembentukan peradaban Islam di kawasan Afrika dan Mediterania.

Berakhirnya Kekuasaan Bizantium di Mesir

Salah satu dampak paling signifikan dari penaklukan Mesir adalah berakhirnya kekuasaan Kekaisaran Bizantium di wilayah tersebut. Sebelum penaklukan Islam, Mesir merupakan salah satu provinsi terpenting Bizantium yang berfungsi sebagai pemasok utama gandum bagi ibu kota kekaisaran, yaitu Konstantinopel. Penguasaan Mesir oleh pasukan Islam mengakhiri dominasi politik dan militer Bizantium yang telah berlangsung selama berabad-abad sejak masa Romawi (Kennedy, 2007).

Kekalahan Bizantium di Mesir juga memperlemah posisi strategis mereka di kawasan Mediterania Timur. Hilangnya Mesir menyebabkan berkurangnya sumber daya ekonomi, militer, dan logistik bagi kekaisaran. Selain

itu, penaklukan ini mempercepat kemunduran pengaruh Bizantium di wilayah Afrika Utara dan membuka jalan bagi ekspansi Islam ke wilayah-wilayah lain di benua Afrika (Donner, 1981). Dari perspektif masyarakat Mesir, khususnya komunitas Kristen Koptik, berakhirnya pemerintahan Bizantium membawa perubahan yang cukup positif. Selama pemerintahan Bizantium, masyarakat Koptik mengalami tekanan politik dan keagamaan akibat perbedaan doktrin teologis dengan gereja resmi kekaisaran. Pemerintahan Islam pada awalnya memberikan ruang yang lebih luas bagi komunitas Koptik untuk menjalankan kehidupan keagamaannya dengan membayar jizyah sebagai bentuk perlindungan negara (Lapidus, 2014).

Meluasnya Wilayah Kekuasaan Islam ke Afrika Utara

Penaklukan Mesir menjadi titik awal ekspansi Islam ke wilayah Afrika Utara. Setelah berhasil menguasai Mesir, pasukan Muslim menjadikan wilayah tersebut sebagai basis strategis untuk melanjutkan penaklukan ke Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, dan wilayah Maghrib lainnya. Dengan demikian, Mesir berfungsi sebagai jembatan antara Jazirah Arab dan Afrika Utara (Hourani, 1991). Keberhasilan ekspansi ini membawa konsekuensi geopolitik yang sangat besar. Kekuasaan Islam berkembang menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di dunia, membentang dari Semenanjung Iberia di Barat hingga Asia Tengah di Timur. Penguasaan Afrika Utara juga memungkinkan umat Islam mengendalikan jalur perdagangan trans-Sahara yang menghubungkan kawasan Mediterania dengan Afrika Sub-Sahara (Hodgson, 1974). Selain itu, ekspansi ke Afrika Utara menjadi landasan bagi penaklukan Semenanjung Iberia (Andalusia) pada tahun 711 M. Dengan demikian, keberhasilan penaklukan Mesir memiliki dampak strategis yang jauh melampaui wilayah Mesir itu sendiri dan menjadi salah satu faktor utama penyebaran peradaban Islam di kawasan Barat.

Berkembangnya Mesir sebagai Pusat Perdagangan Islam

Setelah berada di bawah pemerintahan Islam, Mesir berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan internasional yang sangat penting. Letak geografis Mesir yang strategis, yaitu di persimpangan antara Asia, Afrika, dan Eropa, menjadikannya pusat distribusi barang dan perdagangan maritim maupun darat (Lapidus, 2014). Kota Fustat, yang didirikan oleh Amr bin Ash pada tahun 641 M, berkembang menjadi pusat administrasi, perdagangan, dan kebudayaan Islam. Para pedagang dari Jazirah Arab, Afrika, India, dan kawasan Mediterania menjadikan Mesir sebagai salah satu titik perdagangan utama. Berbagai komoditas seperti gandum, tekstil, rempah-rempah, emas, dan barang-barang mewah diperdagangkan melalui wilayah ini (Kennedy, 2022).

Kemajuan perdagangan di Mesir juga didukung oleh stabilitas politik yang dibangun oleh pemerintahan Islam. Sistem perpajakan yang relatif teratur dan jaringan perdagangan yang luas memungkinkan Mesir mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Pada masa Dinasti Fatimiyah dan Mamluk, Mesir bahkan menjadi pusat perdagangan internasional yang menghubungkan Timur dan Barat (Berkey, 2003).

Meningkatnya Penyebaran Agama Islam di Kawasan Afrika

Penaklukan Mesir menjadi awal proses Islamisasi di Afrika. Meskipun proses konversi agama tidak berlangsung secara cepat, keberadaan pemerintahan Islam menciptakan kondisi yang memungkinkan penyebaran Islam melalui perdagangan, pendidikan, dakwah, dan interaksi sosial (Levtzion & Pouwels, 2000). Mesir kemudian menjadi pusat penyebaran Islam ke wilayah Sudan, Nubia, Afrika Timur, dan Afrika Barat. Para ulama, pedagang, dan sufi memainkan peran penting dalam memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat lokal. Proses penyebaran ini berlangsung secara bertahap dan umumnya melalui pendekatan damai, sehingga menghasilkan akulturasi budaya yang unik antara tradisi lokal dan ajaran Islam (Levtzion & Pouwels, 2000).

Dalam jangka panjang, Islam menjadi agama mayoritas di sebagian besar wilayah Afrika Utara. Bahkan hingga saat ini, kawasan tersebut tetap menjadi salah satu pusat utama peradaban Islam dunia. Keberhasilan penyebaran Islam di Afrika menunjukkan bahwa penaklukan Mesir bukan hanya peristiwa militer, tetapi juga menjadi titik awal transformasi sosial dan budaya yang sangat luas (Lapidus, 2014). Setelah Mesir berada di bawah pemerintahan Islam, terbentuk ruang sosial baru yang mempertemukan kelompok Arab-Muslim dengan masyarakat Mesir yang telah memiliki tradisi, bahasa, institusi keagamaan, dan kebudayaan yang berkembang sebelumnya. Interaksi tersebut kemudian menghasilkan proses adaptasi, negosiasi, dan pertukaran budaya yang turut membentuk karakter masyarakat Islam di Mesir dan wilayah sekitarnya.

Salah satu perubahan penting berlangsung melalui pembentukan institusi sosial dan administratif Islam. Pemerintahan baru secara bertahap memperkenalkan sistem administrasi, perpajakan, hukum, dan jaringan

komunikasi yang menghubungkan Mesir dengan pusat kekhalifahan. Transformasi juga berlangsung dalam bidang bahasa dan kebudayaan. Bahasa Arab secara bertahap memperoleh kedudukan yang semakin penting dalam administrasi dan kehidupan publik, sementara bahasa dan tradisi lokal tidak serta-merta menghilang. Dengan demikian, keberhasilan penyebaran Islam di Afrika Utara tidak semata-mata merupakan konsekuensi langsung dari kemenangan militer, melainkan hasil dari proses Islamisasi yang berlangsung secara bertahap dan kompleks.

Munculnya Mesir sebagai Salah Satu Pusat Ilmu Pengetahuan dan Peradaban Islam

Dampak paling berkelanjutan dari penaklukan Mesir adalah berkembangnya wilayah ini sebagai salah satu pusat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Sejak masa Dinasti Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, hingga Mamluk, Mesir memainkan peranan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, filsafat, kedokteran, astronomi, dan studi keagamaan (Hodgson, 1974). Pendirian lembaga pendidikan dan perpustakaan besar menjadikan Mesir sebagai tujuan para pelajar dan ulama dari berbagai wilayah dunia Islam. Salah satu institusi pendidikan paling berpengaruh adalah Al-Azhar University yang didirikan pada tahun 970 M. Al-Azhar berkembang menjadi pusat studi Islam yang memiliki pengaruh global hingga masa modern (Berkey, 1992).

Selain bidang keagamaan, Mesir juga menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan umum. Banyak ilmuwan, sejarawan, dokter, dan filsuf Muslim yang berkarya di Mesir dan menghasilkan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Perpaduan antara warisan intelektual Mesir kuno, Yunani, Romawi, dan Islam menghasilkan sebuah peradaban yang maju dan berpengaruh (Hitti, 1970).

Dengan demikian, penaklukan Mesir oleh Islam tidak hanya mengubah struktur politik kawasan, tetapi juga melahirkan transformasi ekonomi, sosial, budaya, dan intelektual yang berdampak besar terhadap sejarah dunia. Mesir kemudian berkembang menjadi salah satu pusat utama peradaban Islam yang berperan penting dalam penyebaran agama, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan hingga berabad-abad kemudian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penaklukan Mesir oleh Amr bin Ash pada 639–642 M merupakan proses yang keberhasilannya tidak dapat dijelaskan hanya melalui keunggulan militer pasukan Muslim. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa strategi Amr bin Ash bertumpu pada fleksibilitas dan kemampuan mengintegrasikan mobilitas militer dengan pembacaan terhadap kondisi politik dan geografis Mesir serta pendekatan diplomatik. Strategi tersebut terlihat dalam pemilihan sasaran strategis, pergerakan pasukan secara bertahap, pemanfaatan momentum, pengepungan pusat-pusat pertahanan, dan penggunaan negosiasi ketika situasi memungkinkan. Dengan demikian, kekuatan strategi Amr bukan semata-mata pada kemampuan memenangkan pertempuran, tetapi pada kemampuannya menyesuaikan tindakan militer dengan perubahan situasi di lapangan.

Keberhasilan tersebut juga merupakan hasil interaksi antara kepemimpinan Amr bin Ash, dukungan politik Khalifah Umar bin al-Khattab, dan kondisi internal Kekaisaran Bizantium. Dukungan kekhalifahan memberikan legitimasi dan memungkinkan ekspedisi memperoleh tambahan kekuatan ketika menghadapi pertahanan yang kuat, khususnya dalam pengepungan Babilonia. Sementara itu, kondisi politik dan militer Bizantium yang menghadapi berbagai persoalan internal menciptakan lingkungan yang memungkinkan pasukan Muslim memperoleh keuntungan strategis. Kondisi masyarakat Mesir juga menjadi bagian dari konteks penaklukan, tetapi hubungan antara komunitas lokal dan pemerintahan Bizantium bersifat kompleks sehingga tidak dapat disederhanakan sebagai dukungan masyarakat Koptik secara keseluruhan terhadap pasukan Muslim. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penaklukan lebih tepat dipahami sebagai hasil interaksi antara kemampuan strategis pasukan Muslim dengan kerentanan politik dan militer pihak Bizantium.

Dari aspek proses, penaklukan berlangsung secara bertahap melalui penguasaan wilayah strategis, pengepungan dan penguasaan Babilonia, kemudian penyerahan Alexandria. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa penaklukan Mesir bukanlah hasil dari satu pertempuran yang menentukan, melainkan proses militer-politik yang berlangsung selama beberapa tahun. Babilonia menjadi titik penting dalam proses tersebut karena penguasaannya membuka akses menuju wilayah Delta dan Alexandria. Setelah Alexandria berada di bawah kekuasaan Muslim, persoalan yang dihadapi tidak berhenti pada kemenangan militer, tetapi berlanjut pada konsolidasi pemerintahan dan integrasi Mesir ke dalam struktur kekhalifahan. Pembentukan Fustat sebagai

pusat pemerintahan dan militer menjadi salah satu bentuk awal konsolidasi tersebut, sekaligus menciptakan ruang bagi perkembangan administrasi, perdagangan, dan komunitas Muslim di Mesir.

Dampak penaklukan yang dapat dibuktikan dari kajian ini terutama terlihat dalam perubahan politik dan administratif Mesir dari provinsi Bizantium menjadi bagian dari kekhalifahan Islam, serta semakin terintegrasinya Mesir ke dalam jaringan politik dan ekonomi dunia Islam. Dalam bidang sosial dan keagamaan, perubahan berlangsung secara bertahap melalui interaksi antara komunitas Muslim dan masyarakat lokal, bukan melalui perubahan yang berlangsung secara serentak. Perkembangan Fustat menunjukkan terbentuknya ruang sosial dan ekonomi baru yang menghubungkan kelompok penduduk lokal dengan komunitas Arab-Muslim. Dari Mesir, jaringan politik, perdagangan, dan keagamaan Islam kemudian memiliki basis yang lebih kuat untuk berkembang ke arah Afrika Utara. Dengan demikian, dampak penaklukan yang paling relevan bagi penelitian ini adalah terbentuknya kondisi politik, administratif, dan sosial yang memungkinkan Mesir berkembang menjadi salah satu wilayah penting dalam jaringan peradaban Islam.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa signifikansi penaklukan Mesir tidak hanya terletak pada berakhirnya kekuasaan Bizantium di Mesir, tetapi pada proses transformasi yang menghubungkan keberhasilan strategi militer dengan perubahan struktur kekuasaan dan pembentukan pemerintahan Islam di Mesir. Penaklukan tersebut menjadi titik awal bagi proses integrasi Mesir ke dalam dunia Islam yang kemudian berkembang melalui konsolidasi pemerintahan, pembentukan pusat permukiman dan administrasi, serta berkembangnya jaringan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, hubungan antara penaklukan dan perkembangan peradaban Islam perlu dipahami sebagai proses historis bertahap, bukan sebagai hubungan sebab-akibat langsung yang menjadikan seluruh perkembangan peradaban Islam pada periode berikutnya semata-mata sebagai hasil penaklukan Amr bin Ash.

Daftar Pustaka

- Abdurahman, Dudung. (2011). *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- Al-Baladhuri. (1916), *Futuh al-Buldan*, terj. Philip Hitti. New York: Columbia University Press.
- Abd al-Hakam, I. (1968). *Futūḥ Miṣr wa-akhbārūhā* (Vol. 3). *يطلب من مكتبة المثني*.
- bin Jarir al-Tabari, M. (1967). *Tarikh Al-Rusul Wa-Al-Muluk*. Beirut: Dar al-Turath H, 1387.
- Al-Umari, Akram Diya (1991). *Madinan Society at the Time of the Prophet*. Virginia: IIIT.
- Atiya, Aziz S. (1968). *A History of Eastern Christianity*. Notre Dame: University of Notre Dame Press.
- Bakri, S., & Naj'ma, D. B. A. (2020). Membangun Metodologi Penelitian Sejarah Untuk Pengembangan Islamic Studies. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 4(1), 39-54. DOI: <https://doi.org/10.22515/academica.v4i1.3155>.
- Berkey, Jonathan P. (2003). *The Formation of Islam*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Butler, Alfred J. (1902). *The Arab Conquest of Egypt*. Oxford: Clarendon Press.
- Creswell, John W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications.
- Crone, Patricia. (2004). *God's Rule*. New York: Columbia University Press.
- Donner, Fred M. (1981). *The Early Islamic Conquests*. Princeton: Princeton University Press.
- Donner, Fred M. (2010), *Muhammad and the Believers*. Cambridge: Harvard University Press.
- Gottschalk, Louis. *Understanding History: A Primer of Historical Method*. 2nd ed. New York: Alfred A. Knopf, 1969.
- Hitti, Philip K. (1970). *History of the Arabs*. London: Macmillan.
- Hodgson, M. G. S. (1974). *The venture of Islam: Conscience and history in a world civilization* (Vol. 3, *The gunpowder empires and modern times*). University of Chicago Press. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226346885.001.0001>

- Hourani, Albert. (1991). *A History of the Arab Peoples*. London: Faber and Faber.
- Juynboll, G. H. (Ed.). (2015). *The History of al-Ṭabarī Vol. 13: The Conquest of Iraq, Southwestern Persia, and Egypt: The Middle Years of 'Umar's Caliphate AD 636-642/AH 15-21*. SUNY Press.
- Kaegi, W. E. (1992). *Byzantium and the early Islamic conquests* (pp. 223-227). Cambridge University Press.
- Kaegi, W. E. (2022). *The Muslim Expansion and Byzantium*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kennedy, H. (2007). *The great Arab conquests: How the spread of Islam changed the world we live in*. Da Capo Press, Incorporated.
- Kennedy, H. (1998). Egypt as a Province in the Islamic Caliphate, 641-868. *The Cambridge History of Egypt*, 1, 62-85. DOI: <https://doi.org/10.1017/CHOL9780521471374.004>
- Kennedy, H. (2022). *The Prophet and the age of the Caliphates: the Islamic Near East from the sixth to the eleventh century*. Taylor & Francis.
- Lapidus, Ira M. (2014). *A History of Islamic Societies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Levtzion, Nehemia & Randall L. Pouwels (eds.). (2000). *The History of Islam in Africa*. Athens: Ohio University Press.
- Lewis, Bernard. (2002). *The Arabs in History*. Oxford: Oxford University Press.
- Norwich, John Julius. (1996). *Byzantium: The Early Centuries*. London: Penguin.